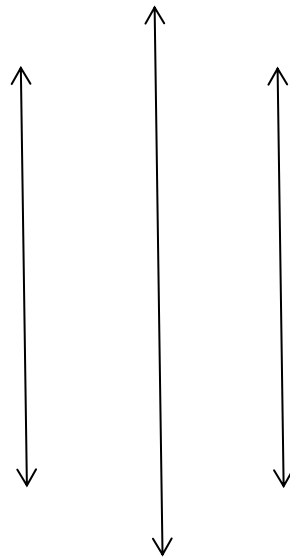


BADAN RESERSE KRIMINAL
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI



MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI
TRIWULAN II T.A. 2017



JAKARTA, 30 JUNI 2017



**MONITORING DAN EVALUASI
TRIWULAN II TAHUN 2017
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- c. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
- d. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- e. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/10/I/2017/Tipidkor tanggal 10 Januari 2017 tentang pelaksanaan tim penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas).

2. EVALUASI

Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) merupakan sistem yang disediakan oleh Dittipidkor Bareskrim Polri bagi masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Polri. Pengaduan Masyarakat berperan besar dalam penanganan korupsi karena merupakan sarana yang dapat digunakan masyarakat apabila ingin melaporkan tindak pidana korupsi secara langsung.

Dari penanganan dumas yang didapat, Dittipidkor Bareskrim Polri tahun 2017 melakukan pelimpahan dumas ke Polda jajaran dikarenakan perkara tersebut mempunyai tingkat kesulitan yang tidak terlampau sulit, hal tersebut dibuktikan dengan sudah adanya informasi yang cukup mengenai barang bukti dan terlapor, sehingga cukup dapat ditangani oleh Polda setempat. Kemudian dari pelimpahan dumas ke wilayah tersebut, Dittipidkor memonitor perkembangan kasus tersebut dengan meminta laporan secara rutin sehingga penanganan perkara tersebut dapat maksimal.

Namun hingga saat ini untuk pelaporan dumas belum dapat dilaksanakan dengan maksimal karena subdit tipidkor di polda setempat tidak melakukan pelaporan *progress* telaah dumas secara berkala ke Dittipidkor Bareskrim.

3. KESIMPULAN

Secara umum, penerimaan dumas sudah berjalan sesuai dengan SOP. Namun, pelaporan *progress* penanganan dumas dari polda jajaran perlu diperbaiki.

4. PENUTUP

Demikian Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 30 Juni 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI